

Upaya Pencegahan *Stunting* di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Sentia Indah¹, Rahmadani Yusran

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Padang

Email: sentiaindah2000@gmail.com, yusranrdy@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi *stunting* di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada instansi dan pihak yang berkaitan yang ada di Nagari Inderapura Barat yang berhubungan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi *stunting* di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Instansi dan pihak terkait juga sekaligus menjadi informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemerintah nagari telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan *stunting* berupa pelaksanaan kegiatan posyandu, pemberian PMT bagi anak balita *stunting*, dan pendirian rumah desa sehat. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kegiatan posyandu tidak rutin dilaksanakan, kegiatan PMT masih terbatas dan rumah desa sehat belum dapat dijalankan.

Kata kunci: *Kebijakan, Implementasi, Nagari Inderapura Barat, Stunting*

Abstract

This study aims to analyze the government's efforts in overcoming stunting in Nagari Inderapura Barat, Pancung Problem District, Pesisir Selatan Regency. This type of research is a qualitative research with descriptive method. The research was carried out on agencies and related parties in Nagari Inderapura Barat related to government efforts in overcoming stunting in Nagari Inderapura Barat, Pancung Problem District, Pesisir Selatan Regency. Related agencies and parties are also research informants. The results of the study indicate that the nagari government has implemented various stunting prevention efforts in the form of implementing posyandu activities, providing PMT for stunted children under five, and establishing healthy village houses. However, in practice these activities have not been carried out in accordance with applicable regulations. This is because posyandu activities are not routinely carried out, PMT activities are still limited and healthy village houses cannot be run.

Keywords: *Policy, Implementation, Government, Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting yaitu keadaan anak usia 0 - 2 tahun dengan ukuran tinggi tubuh lebih pendek dibanding dengan umurnya. Kondisi ini dapat diamati melalui pemantauan terhadap tinggi anak balita yang melebihi 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak sesuai dengan standar WHO. Dimana anak balita mengalami *stunting* disebabkan banyak faktor, antara lain keadaan ekonomi dan sosial, gizi ibu saat hamil, bayi yang sakit dan kurangnya asupan gizi pada bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan *stunting* di

Indonesia terdapat dua program melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive. Intervensi gizi spesifik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan upaya kesehatan dalam mengatasi *stunting*. Misalnya, status gizi ibu, kemudian infeksi, asupan makanannya, penyakit menular serta kesehatan lingkungan. Gizi spesifik biasanya dilaksanakan oleh bidang kesehatan. Sedangkan gizi sensitive merupakan kegiatan dalam upaya mengatasi *stunting* yang biasanya berada di luar sektor kesehatan seperti dalam penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, kemudian dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan hamil, dls yang biasanya berada di luar sektor kesehatan (Bappenas 2018).

Indonesia adalah salah negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi yaitu 37% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013). Pada tahun 2019 turun menjadi 27,67% (Sudikno, dkk, 2019). Dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi salah satunya yaitu pada Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Dokumen Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018 – 2024 pada pilar dua yang bertujuan agar dapat membangun komitmen dan adanya dukungan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan pencegahan *stunting*.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah lokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Tingkat prevalensi *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 30,1 % melebihi standar prevalensi *stunting* menurut WHO (Sudikno, dkk, 2019). Maka, sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penandatanganan Komitmen Pencegahan *Stunting*. Kecamatan Pancung Soal adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tingkat prevalensi *stunting* yaitu sebesar 3,5% untuk anak balita pendek dan 6,7% untuk anak balita sangat pendek berdasarkan pada persebaran data *stunting* wilayah kerja Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal. Di Kecamatan Pancung Soal terdapat beberapa nagari yang memiliki tingkat *stunting* yang cukup tinggi salah satunya yaitu di Nagari Inderapura Barat sebesar 5% atau 6 anak balita *stunting* (Data *Stunting* Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal 2021). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana upaya pencegahan *stunting* di Nagari Inderapura Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada dinas atau instansi dan pihak terkait yang ada di Kecamatan Pancung Soal. Instansi atau dinas dan pihak terkait sekaligus menjadi informan dalam penelitian yaitu Wali Nagari Inderapura Barat, Ketua PKK Nagari Inderapura Barat, Bidan Desa Nagari Inderapura Barat, KPM Nagari Inderapura Barat, Tendik PAUD Nagari Inderapura Barat, dan Tenaga Pengelola Gizi Puskesmas Kecamatan Pancung Soal. Teknik analisis data yaitu berdasarkan pada teori dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012, hal. 247-252) berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Inderapura Barat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dilakukan dalam beberapa program atau kegiatan berupa pelaksanaan kegiatan posyandu, pemberian PMT kepada anak balita *stunting* dan pendirian Rumah Desa Sehat. Adapun pelaksanaan beberapa program atau kegiatan tersebut yaitu :

Pertama, Kegiatan posyandu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di setiap nagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal termasuk Nagari Inderapura Barat, dimana sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam pencegahan maupun penanganan *stunting*. Pelaksanaan posyandu di Nagari Inderapura Barat dilaksanakan oleh kader posyandu yaitu Bidan Desa Nagari Inderapura Barat dan Kader Pembangunan Masyarakat. Di Nagari Inderapura Barat terdapat dua bidan desa dan satu orang KPM. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di posyandu yaitu seperti melakukan penimbangan dan pengukuran anak balita, melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil (TTD). Dalam kegiatan posyandu anak balita akan diukur tinggi dan ditimbang berat badannya yang selanjutnya akan didata oleh KPM nagari dan bidan desa. Setelah dilakukan pendataan oleh KPM nagari dan bidan desa akan menghasilkan data jumlah anak balita yang *stunting* di Nagari Inderapura Barat. Selanjutnya data anak yang terindikasi *stunting* tersebut dilaporkan oleh KPM Nagari Inderapura kepada Nagari Inderapura Barat dan Bidan Desa Nagari Inderapura barat melaporkan kepada Puskesmas Pancung Soal melalui Tenaga Pengelola Gizi.

Kedua, setelah sebelumnya dilakukan pendataan pada kegiatan posyandu dan pelaporan data kepada masing-masing pihak oleh KPM Nagari Inderapura Barat dan Bidan Desa Nagari Inderapura Barat. Selanjutnya, data anak yang terindikasi *stunting* dilaporkan oleh KPM Nagari Inderapura Barat kepada Pemerintah Nagari Inderapura Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh nagari berupa anggaran untuk pemberian PMT bagi anak balita *stunting*. Sedangkan Bidan Desa Nagari Inderapura Barat melaporkan data anak yang *stunting* kepada Puskesmas Pancung Soal melalui Tenaga Pengelola Gizi untuk ditindaklanjuti berupa turun ke lapangan yaitu ke rumah anak yang *stunting* untuk dilakukan peninjauan dan wawancara kepada orang tua balita *stunting*. Dalam pelaksanaan peninjauan tersebut biasanya bidan desa bersama tenaga pengelola gizi serta tenaga kesehatan lingkungan akan melihat bagaimana lingkungan rumah anak balita *stunting*, kondisi rumahnya, bagaimana pola makannya, serta bagaimana bentuk pola pengasuhan oleh orang tua balita *stunting*. Setelah dilakukan peninjauan dan wawancara selanjutnya apabila anak balita *stunting* berasal dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan menunjang maka pihak puskesmas bersama bidan desa akan memberikan berupa penyuluhan terkait menjaga kesehatan, pola makanan sehat, dan pola asuh agar dapat menghindari dan mencegah *stunting*. Sedangkan apabila keluarga anak balita *stunting* berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi rendah maka akan diberikan bantuan PMT oleh pihak puskesmas maupun nagari. Untuk pemberian PMT dari pihak puskesmas biasanya diberikan dalam bentuk susu, roti, kacang hijau, dls. Sedangkan untuk PMT yang diberikan oleh Nagari Inderapura Barat berupa makanan sehat khusus yang diberikan kepada anak balita *stunting* selama tiga hari berturut-turut dalam satu bulan oleh KPM Nagari Inderapura Barat. Biasanya makanan khusus ini berupa makanan yang tercukupi gizinya yaitu 4 sehat 5 sempurna dan dimasak langsung oleh KPM Nagari Inderapura Barat di rumahnya. Selanjutnya KPM Nagari Inderapura Barat akan mengantarkan makanan tersebut ke masing-masing rumah anak yang *stunting*. Pemberian PMT baik oleh Puskesmas Pancung Soal maupun oleh Nagari Inderapura Barat bertujuan agar anak-anak balita *stunting* dapat ternutrisi dengan baik sehingga dapat memperbaiki kesehatan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ketiga, dalam pencegahan dan penurunan *stunting* pemerintah Nagari Inderapura Barat telah mendirikan RDS. Adapun lokasi RDS Nagari Inderapura Barat berada dekat dengan Kantor Wali Nagari Inderapura Barat dan Poskesri Nagari Inderapura Barat. RDS berfungsi sebagai salah satu program pusat yang dilaksanakan di tingkat desa. Tujuannya adalah sebagai pusat informasi kesehatan bagi seluruh masyarakat di desa atau nagari. Dalam pelaksanaannya, RDS memiliki beberapa pos kesehatan berupa pos gizi, pos balita, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan RDS juga melibatkan puskesmas yang terdiri dari tenaga

pengelola gizi dan kesehatan lingkungan, pihak penyuluh KB, bidan desa, KPM, dan kader nagari lainnya. RDS bersifat multisektoral dan merupakan bentuk kerjasama antar berbagai *stakeholders* terkait dalam pencegahan *stunting*.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum berhasil mewujudkan capaian tujuan kebijakan. Hal ini, disebabkan karena beberapa permasalahan berikut: Pertama, dalam pelaksanaan kegiatan posyandu berupa penimbangan dan pengukuran, pemeriksaan ibu hamil serta melakukan pemberian tablet tambah darah (TTD) tidak dilaksanakan secara rutin oleh pihak Nagari Inderapura Barat. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari Inderapura Barat. Akibatnya, sulit menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Nagari Inderapura Barat termasuk pelayanan kesehatan lainnya bagi anak balita dan ibu hamil.

Kedua, belum efektifnya pemberian PMT kepada anak balita *stunting*. Hal ini dikarenakan PMT yang diberikan hanya dilakukan selama tiga hari berturut-turut sehingga ini dianggap belum mampu mengatasi permasalahan pada anak balita yang *stunting*. Dimana pemberian PMT yang hanya dilakukan selama tiga hari berturut-turut tersebut tidak dapat memberikan efek atau membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* terhadap anak balita yang *stunting*.

Ketiga, pendirian rumah desa sehat di Nagari Inderapura Barat. RDS di Inderapura Barat belum dapat dijalankan oleh Pemerintahan Nagari Inderapura Barat sebagaimana fungsinya. Dimana kegiatan belum adanya kegiatan atau pelaksanaan berbagai kegiatan di RDS tersebut seperti pelaksanaan posyandu, pembuatan PMT, dls. Dimana untuk pembuatan PMT bagi anak yang *stunting* yang dilakukan oleh KPM Nagari Inderapura Barat masih dilakukan di rumah pribadi kader, bukan di RDS. Sehingga fungsi dari RDS sebagai pusat kesehatan masyarakat di Nagari Inderapura Barat belum dapat dilaksanakan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan RDS di Nagari Inderapura Barat secara fisik kurang mendukung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bangunan yang masih semi permanen dan sudah cukup tua serta kurang terawat, kurangnya fasilitas di dalam RDS tersebut yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan. Selain itu, RDS di Nagari Inderapura Barat juga digunakan sebagai posko isolasi covid-19. Sehingga, ini membuat RDS di Nagari Inderapura Barat belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Menariknya, jika dilihat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki tingkat prevalensi *stunting* yang cukup tinggi yaitu 26,4% yang artinya masih lebih besar dibandingkan dengan nilai standar prevalensi yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Namun demikian, capaian kebijakan belum berhasil dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Hal ini, dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Padang (Febrian & Yusran, 2021); (Iqbal & Yusran, 2021). Demikian juga, di Kabupaten Solok (Media & Elfemi, 2021); Kabupaten Solok Selatan (Sari, D. P., & Yusran, R., 2022); dan Kabupaten Padang Pariaman (Yasri & Yusran, 2022) juga mengindikasikan implementasi kebijakan belum berhasil mewujudkan capaian pencegahan *stunting*. Di Kota Padang misalnya, Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Febrian & Yusran, 2021). Demikian juga, aksi konvergensi kebijakan pencegahan *stunting* di Kota Padang masih belum dilaksanakan sesuai dengan tujuan konvergensi kebijakan. Hal ini, disebabkan karena selama ini pencegahan *stunting* hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya padahal seharusnya dilaksanakan oleh lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak (Iqbal & Yusran, 2021). Berbeda kajian tersebut, penelitian ini memansang implementasi Kebijakan penurunan dan pencegahan *stunting* masih memerlukan upaya yang komprehensif. Ini, karena Program-program yang dilaksanakan di tingkat Desa/Nagari belum termanifestasikan ke dalam nilai-nilai yang berkembang di Desa/Nagari. Program seperti, posyandu, pemberian PMT dan pendirian RDS belum dapat diikuti oleh masyarakat sebagaimana dianjurkan dalam

peraturan yang berlaku. Inilah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan tentang upaya pencegahan *stunting* di Nagari Inderapura Barat dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pelaksanaan pencegahan *stunting* di Inderapura Barat belum berjalan sesuai dengan ketentuan, hal ini dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan posyandu tidak rutin dilaksanakan, kemudian pemberian PMT yang terbatas dan RDS tidak dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya. Hal ini berdampak terhadap sulitnya menurunkan tingkat prevalensi *stunting* di Nagari Inderapura Barat sehingga diharapkan kedepannya pemerintah Nagari Inderapura Barat dapat lebih aktif lagi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alamsyah, K. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Aprina, Y., & Yusran, R. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 87-97.
- Dedi, M. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Elfemi, N. (2021). Permasalahan Sosial Budaya Dan Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), 56-68.
- Febrian, F., & Yusran, R. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 11-21.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Bebas Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Grava Media.
- Iqbal, M., & Yusran, R. 2021. Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 109-116.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Kemnekes RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS*. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI.
- Khairi, H. 2014. *Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional*. Universitas Terbuka.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, S. R. 2019. Manajemen Kampanye Komunikasi Kesehatan Dalam Upaya Pengurangan Prevalensi Balita Stunting. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(1), 1-19.
- Sari, D. P., & Yusran, R. 2022. Evaluasi kebijakan Pencegahan *Stunting* di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90-100.
- Sudikno, dkk. 2019. *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia*.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suwitri, Sri. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. In : Konsep Dasar Kebijakan Publik. Jakarta : Universitas Terbuka.
- WHO. 2017. World Health Statistics 2017 Monitoring Health For The SDGs, Sustainable Development Goals. France. Diakses dari link : https://who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/
- Yasri, A., & Yusran, R. 2022. Implementasi Program Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi (LNPPG) dalam Pencegahan *Stunting* di kabupaten Padang pariaman. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 30-35.
- Yusran, R., Barlian, E., Fatimah, S., Umar, I., & Razak, A. (2021). Reconnection of Food Policy, Environmental Ecosystem and Its Impact on Stunting Prevalence. *Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture*, 2(7), 47-52.